

MODEL PENGELOLAAN KELAS DI SEKOLAH DASAR INKLUSI KABUPATEN BOJONEGORO

Hisbollah¹⁾, Budiyanto²⁾, Mudjito³⁾
^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Negeri Surabaya
hisbollah.19002@mhs.unesa.ac.id
budiyanto@unesa.ac.id
mudjitomudjito@unesa.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 23 April 2023

Revisi, 31 Mei 2023

Diterima, 9 Juni 2023

Publish, 15 September 2023

Kata Kunci :

Pengelolaan Kelas
Sekolah Inklusif
Sekolah Dasar

ABSTRAK

Proses dalam mengelola pembelajaran pada sekolah inklusi ini tidak sama dengan sekolah reguler. Hal ini disebabkan bahwa peserta didik yang berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi ini menjadikan proses pembelajaran yang ada dalam kelas ini wajib dilakukan pengelolaan dengan khusus. Tujuan penelitian ini ialah agar dapat menggambarkan pengelolaan kelas terhadap siswa yang berkebutuhan khusus, dan aspek sistem dukungan untuk pnegelolaan kelas inklusi pada SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif self-report. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan kelas pada sekolah inklusi SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpa dalam aspek interaksi siswa reguler dengan yang berkebutuhan khusus, semua guru telah dapat menjalankan interaksi dalam mendengarkan, berbicara serta non-verbal, sementara itu, masih belum diimplementasikan dengan secara tertulis. Sementara itu, dalam hal pengaturan keadaan fisik kelas ini telah layak, walaupun hal ini, sarana-prasarana ini masih banyak ditemukan beberapa sisi yang wajib untuk dinaikkan, terutama media untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, yakni ruang stimulus rendah dan tinggi yang masih belum ada dan juga ruang sumber yang juga masih belum ada.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Hisbollah

Universitas Negeri Surabaya

1. PENDAHULUAN

Pendidikan didefinisikan dengan satu dari berbagai upaya yang fundamental yang dimaksudkan agar dapat menaikkan mutu sumber daya manusia supaya nantinya dapat menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan mandiri. Pendidikan diartikan dengan satu dari berbagai usaha yang tujuannya ialah mengarahkan serta mendidik sumber daya manusia supaya menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Pendidikan di Negara Indonesia ini diselenggarakan dengan secara merata untuk seluruh anak, mencakup dengan anak yang berkebutuhan khusus. Upaya yang pemerintah lakukan ini merupakan satu dari berbagai upaya untuk peningkatan serta pemerataan kualitas pendidikan untuk seluruh anak ini ialah dengan menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Sekolah inklusif ini menerima anak berkebutuhan khusus agar belajar dalam setting kelas yang sama dengan kelas reguler yang lainnya. upaya ini dimaksudkan supaya siswa yang berkebutuhan khusus ini dapat berinteraksi serta belajar dengan siswa yang seusianya secara bersama-sama.

Satu dari berbagai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini ialah menyediakan akomodasi untuk tiap perbedaan yang siswa tersebut miliki, baik itu yang siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang reguler. Mengacu uraian Ilahi (2013), menyebutkan bahwa pendidikan inklusif ini diartikan dengan layanan pendidikan yang menyediakan layanan serta fasilitas kepada anak yang berkebutuhan khusus supaya dapat berinteraksi serta belajar dengan siswa seusianya di beberapa sekolah-sekolah

terdekatnya tersebut. Dengan melalui sistem pendidikan inklusif ini, diekspektasikan dapat menyediakan kesempatan untuk anak yang berkebutuhan khusus agar dapat mengoptimalkan tiap potensi yang ada dalam dirinya. Landasan Pendidikan Inklusif yang terjadi di neagra Indonesia ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 yang bunyinya ialah bahwa tiap siswa yang mempunyai kelainan sosial, mental, emosional, fisik ataupun mempunyai potensi kecerdasan serta bakat istimewa diberikan hak guna menjalani pendidikan dengan inklusif dalam tiap satuan pendidikan tertentu dengan berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya tersebut.

Upaya konkrit yang sudah Direktorat PKLK lakukan ini antara lain ialah menyediakan Banper (bantuan pemerintah) terhadap Pokja (kelompok kerja) pelaksana pendidikan inklusif pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Bentuk dari tindak lanjut atas penyaluran dana ini, Pokja penerima dana wajib dengan melalui gerakan mengencarkan dan menjalankan sistem pendidikan inklusif yang ada dalam lembaga pemerintahan dan masyarakat. Hasil kinerja yang sudah dijalankan hingga sekarang ini terdapat 113 kabupaten/kota dan 12 provinsi sudah menyatakan dirinya sebagai kota/kabupaten dan provinsi inklusif.

Pendidikan inklusif ini berusaha menyediakan layanan paling baik sebagai bentuk upayanya untuk menyediakan akomodasi kebutuhan terhadap anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dinyatakan Garnida (2015), mengungkapkan bahwa dalam sistem pendidikan inklusif ini, sekolah wajib untuk bersiap menerima keadaan siswa apapun serta dapat menyediakan fasilitas serta seluruh kebutuhan untuk proses pembelajarannya tersebut. Mengacu uraian Bendová in Skutil, Zikl et al., (2011), menyebutkan bahwa dalam konteks mendidik anak-anak dengan yang berkebutuhan pendidikan khusus, membahas mengenai kelas inklusif yang merepresentasikan lingkungan pendidikan terbuka bagi seluruh pihak dengan tanpa prasangka serta diskriminasi, yakni diperuntukkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang tidak memberikan keuntungan baik untuk secara orang asing, sosial dan lain sebagainya.

Pendidikan inklusif diartikan dengan suatu sistem yang dirancang untuk sebagai upaya dalam menyediakan hak mendasar untuk tiap anak yang merupakan sebagai warga Negara, dalam hal ini berbentuk dengan penyediaan pendidikan. Konsep pendidikan inklusif ini secara umum diselenggarakan dengan cara terbuka serta menerima siswa. Konsep ini ialah sebagai satu dari berbagai gagasan implementasi sierta pendidikan yang secara universal, dengan demikian ini akan dapat merealisasikan sekolah yang responsif terhadap kebutuhan serta keberagaman yang siswa tersebut miliki. Dengan demikian, pendidikan inklusif ini menjamin keterlibatan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam kehidupan

sekolahnya dengan cara yang menyeluruh. Ada berbagai hal yang sebagai pedoman wajib untuk tiap sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan berlandaskan Permendiknas No.70 tahun 2009. Aturan ini di dalamnya berisikan mengenai berbagai unsur yang wajib tersedia dalam sistem pendidikan inklusif ini antara lain ialah pemberdayaan masyarakat, sanksi dan penghargaan, pembiayaan, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, sistem kenaikan kelas, aktivitas pembelajaran, ketenangan, kurikulum, identifikasi dan asesmen, dan peserta didik itu sendiri.

Lebih lanjut, terdapat berbagai hal penting yang wajib untuk dicermati dalam menjalankan pendidikan inklusif ini, yakni terdapatnya sistem pengelolaan kelas. Hal ini disebabkan bahwa ini akan sangat memberi pengaruh terhadap proses pembelajaran yang diperuntukkan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Pembentukan pengelolaan kelas ini tujuannya ialah agar memudahkan guru dalam mengatur serta menjalankan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas dengan efisien serta efektif. Penyelenggaraan pengelolaan kelas dalam setting pendidikan inklusif pada dasarnya telah diatur dalam pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2011. Mengacu terhadap pedoman ini, mengungkapkan bahwa pengelolaan pembelajaran dalam pendidikan inklusif ini antara lain di dalamnya terdapat atas pelaksanaan dalam kelas khusus, kelas reguler dengan pendampingan GPK (Guru Pendamping Khusus), serta kelas reguler penuh. Mengacu uraian Hermanto (2010), mengungkapkan bahwa pengelolaan kelas inklusif ini untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini sangatlah fundamntal, ini dimaksudkan agar proses berjalannya pembelajaran ini dapat berjalan dengan bermakna serta lebih nyaman.

Proses penerapan pendidikan inklusif ini telah jamak berlangsung di semua wilayah di Negara indineisa, antara lain yang dilangsungkan pada Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro ini ialah satu dari berbagai kabutuhan yang ada pada Jawa Timur yang merupakan sebagai kabupaten yang menguatkan program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Kabupaten Bojonegoro No. 38 tahun 2013. Berdasarkan data yang didapatkan berasal dari Dinas Pendidikan Bojonegoro tahun 2018 menjelaskan bahwa ada sejumlah 1.090 anak berkebutuhan khusus yang menjalani proses pendidikan pada sekolah pendidikan inklusif yang jumlah penyelenggara 1.239 sekolah untuk pendidikan inklusif. Sekolah inklusif ini secara rinci mencakup dengan jenjang TK dengan jumlah 312 lembaga, SD dengan jumlah 737 lembaga, SMP dengan jumlah 84 lembaga dan tiap-tiap 53 lembaga untuk SMA dan SMK. Beberapa sekolah ini telah memiliki SK yang merupakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Mengacu pada hasil pendahuluan dan observasi pada Kabupaten Bojonegoro, disebutkan bahwa ada dua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini, di antaranya ialah SD Muhammadiyah 3 ICP Kecamatan Sumberrejo, dan SD Islam Terpadu Bojonegoro. SD Muhammadiyah 3 ICP Kecamatan Sumberrejo ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun ajaran 2013-2014 yang selama ini telah berjalan selama tujuh tahun menerima siswa berkebutuhan khusus untuk secara bersama-sama belajar dengan anak reguler. Sekarang ini mempunyai peserta didik berkebutuhan khusus, lamban belajar, anak autisme serta lamban bicara.

Observasi awal terhadap hasil wawancara yang memperlihatkan pihak Kepala Sekolah pada SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo pembelajaran dalam sekolah ini ialah dengan mempergunakan kurikulum sekolah reguler umum. Guru atau pendidik yang mengajar pada sekolah ini juga beragam, di dalamnya terdiri dengan guru kelas umum yang latar belakang pendidikannya ialah sekolah umum non-PLB dan guru kunjung yang mempunyai keterampilan kerumahtanggaan, kesenian serta keterampilan. Proses pembelajaran ini dilaksanakan di dalam sekolah tersebut ialah setiap hari dengan memperlihatkan siswa reguler dengan yang berkebutuhan khusus secara bersama-sama dalam satu ruangan kelas.

Pembelajaran yang dilaksanakan ini ialah di dalam ruang kelas yang sama setiap harinya, yakni yang berkebutuhan khusus dengan siswa reguler. Akan tetapi, untuk beberapa anak yang belajarnya lambat diadakan pendampingan serta beberapa optimalisasi kemampuan belajar, dalam hal ini ialah berbentuk dengan remidi. Mengacu pada pengamatan awal yang guru kelas sudah lakukan yang berhadapan dengan berbagai kesulitan dalam memperlihatkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dengan secara aktif. Berbagai kesulitan yang dijumpai antara lain ialah metode pengajaran serta aspek pemilihan teknis yang sejalan dengan tiap siswa yang berlandaskan terhadap kondisi dan keadaannya.

Kedua, Sekolah Dasar Islam Terpadu Bojonegoro yang merupakan penyelenggara pendidikan inklusif semenjak tahun ajaran 2014/2015. Dengan berdasarkan pada hasil awal observasi yang peneliti lakukan dengan SD Islam Terpadu. Hasil wawancara dengan memperlihatkan pihak kepala sekolah ini, bahwa problematika yang sekolah penyelenggara inklusif alami ini pada dasarnya sama dengan yang dialami SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo, yakni tidak tersedianya guru pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa yang merupakan sebagai guru pendamping khususnya, dengan demikian pihak sekolah mengangkat guru lulusan PGSD untuk menjadi pengajar anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dengan demikian

guru akan kesulitan dalam mengelola kelas ketika berlangsungnya proses pembelajaran ini. Selain itu, ketika proses berlangsungnya pembelajaran untuk siswa reguler ini acapkali melakukan bully pada siswa-siswi yang berkebutuhan khusus, dengan demikian proses pembelajaran yang dilaksanakan ini menjadi tidak kondusif serta pembelajaran ini tidak akan secara optimal dapat berjalan. Lebih lanjut, sarana-prasarana pendukung untuk pembelajaran ABK ini masih kurang, dalam hal ini ialah aksesibilitas di sekolah yang masih belum ada, ruang sumber, serta berbagai media pembelajaran yang terbatas di sekolah masih belum banyak tersedia pada SD Muhammadiyah 3 dan ICP Sumberrejo.

Mengacu pada hasil observasi awal yang peneliti sudah lakukan ini, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa ada berbagai hal yang wajib dicermati dalam mengelola kelas terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Satu dari berbagai permasalahan mendasar yang terjadi ialah terdapatnya kemampuan siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus yang berbeda, dengan demikian pengelolaan pembelajaran ini wajib dilaksanakan dengan secara tidak sama dan diselaraskan dengan keadaan serta kebutuhan yang tersedia. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus lebih disederhanakan agar lebih bermakna dan dapat dipahami dengan baik oleh anak. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap elemen yang ada di sekolah, baik itu kependidikan serta tenaga pendidik wajib berkolaborasi serta bekerja sama untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif secara menyeluruh.

Jumlah siswa di kelas reguler berjumlah 40-50 anak. Hal ini tentu menyebabkan masalah dalam pembelajaran apabila tidak dilakukan pengelolaan secara efektif pada pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu diperlukan adanya berbagai penyesuaian terhadap layanan pendidikan dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai keberagaman/kebutuhan khusus siswa. Diantara hal yang harus dilakukan penyesuaian juga yaitu diantaranya pada aspek kurikulum. Penataan kelas, sarana prasarana, dan kemampuan interaksi sosial yang antar siswa dalam kelas tersebut. Selain itu, pemahaman guru terkait kondisi anak berkebutuhan khusus juga sebagai unsur yang fundamental. Hal ini karena pengetahuan guru berhubungan dengan pengelolaan dan pelayanan kelas terhadap anak berkebutuhan khusus secara optimal. Jika semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan kelas inklusif sudah diimplementasikan maka akan tercipta pembelajaran yang berkualitas. Indikator dari kualitas pembelajaran yakni terwujudnya iklim kelas yang efektif, kreatif, aktif, serta menyenangkan bagi semua anak. Lebih lanjut, terdapatnya hubungan individu yang sehat ini akan menjadikan perilaku siswa timbul. Maka dari itu, peran guru dalam melakukan pengelolaan kelas merupakan suatu hal yang penting.

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sucuoglu, Bulbin, dkk., menunjukkan bahwa ikatan antara sekolah dan peserta didik terbentuk karena adanya pengelolaan kelas yang baik. Maksud dari hal ini adalah pengelolaan kelas yang dilakukan secara efektif akan berdampak positif pada siswa, baik pada aspek kemampuan akademik, pemahaman, perkembangan emosi, termasuk juga motivasi akademik pada siswa. Untuk penelitian ini, metode penelitiannya ialah berupa penelitian kualitatif dengan mengamati strategi pengelolaan kelas dari 44 guru dinilai dengan menggunakan Formulir Pengamatan Manajemen Kelas Proaktif. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan model pengelolaan kelas di sekolah dasar inklusif Kabupaten Bojonegoro.

2. METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, penelitian ini dilangsungkan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif yang berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini didefinisikan dengan sebuah penelitian yang mempergunakan data deskriptif yang berbentuk dengan kata-kata yang sifatnya lisan serta tertulis yang berasal dari narasumber serta perilaku yang diamatinya. Moleong (2013), menyatakan bahwa penelitian kualitatif didefinisikan dengan penelitian yang berupaya memahami fenomena mengenai apa yang subjek penelitian alami dengan cara deskriptif yang berbentuk dengan bahasa ataupun kata-kata, dalam sebuah konteks khusus alamiah dengan mengoptimalkan beberapa sumber metode alamiahnya. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini ialah berperan sebagai instrumen kuncinya, teknik dalam mengumpulkan data penelitiannya dilaksanakan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis data penelitian ini sifatnya insuktif serta hasil penelitian kualitatif ini lebih memprioritaskan penemuan makna dibandingkan dengan yang sifatnya generalisasi (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini berupaya menyajikan atau menunjukkan hakikat atas hubungan antara responden dengan peneliti secara langsung. Ini dimaksudkan agar menjadikannya lebih peka dalam upayanya melaksanakan penyesuaian diri terhadap berbagai pola nilai yang dihadapinya pada saat berada di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian kualitatif pada penelitian ini didefinisikan dengan rangkaian aktivitas yang tujuannya ialah agar memperoleh informasi serta data yang sifatnya sesungguhnya dan menyediakan pemahaman dengan mendalam serta menyeluruh berkenaan dengan model pengelolaan kelas yang berlangsung dalam sekolah dasar inklusi Kabupaten Bojonegoro.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas ini didefinisikan dengan satu dari berbagai aspek fundamental yang merupakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tujuan dilakukannya pengelolaan penelitian adalah untuk mengoptimalkan terwujudnya pembelajaran dengan cara yang efisien serta efektif. Pengelolaan kelas ini memiliki keterkaitan hubungan yang kuat dengan kemampuan guru dalam menjalankan pengelolaan kelas, dengan demikian ini akan dapat meningkatkan disiplin belajar yang sehat, serta menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan menguntungkan.

Kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan pengelolaan kelas sesuai dengan pernyataan Santrock (2005), aspek pengelolaan kelas dibagi menjadi empat yang meliputi penerapan pemberian umpan balik kepada siswa berupa penghargaan dan hukuman, menerapkan aturan dan prosedur di dalam kelas, membangun atmosfer belajar yang positif, serta meningkatkan interaksi antara guru dan siswa saat di dalam kelas.

Hasil penelitian menemukan bahwa SD Muhammadiyah 3 ICP telah menerapkan gaya pengelolaan kelas dan pendekatan pembelajaran sehingga dapat menciptakan lingkungan yang baik dan positif bagi siswa. Pendekatan pengelolaan yang digunakan yaitu merujuk pada gabungan antara pendekatan kebebasan dan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap perilaku siswa. Guru dalam melaksanakan pendekatan ini peranannya ialah melahirkan serta menjaga kedisiplinan di dalam kelas. Pada sisi yang lain, pendekatan kebebasan didefinisikan dengan upaya yang dimaksudkan agar memudahkan siswa dalam bebas belajar dengan tidak terbatas tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, peran guru sangatlah penting dalam upaya implementasi pendekatan ini secara optimal pada siswa.

Pengelolaan pembelajaran memang suatu unsur penting yang harus dilakukan oleh guru pada setting kelas inklusi. Sama halnya dengan yang diimplementasikan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP, SD Islam Terpadu Bojonegoro juga menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan pengajaran dan pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan Pengajaran adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa pengajaran yang baik ini akan dapat menjadikan permasalahan siswa menjadi tercegah untuk muncul. Fokus utama yang dilakukan pada pendekatan ini adalah melakukan perbaikan dan pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik.

Peran guru ialah melaksanakan perencanaan serta pengimplementasian pengajaran yang baik. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan pengajaran SD Islam Terpadu Bojonegoro menggunakan pendekatan

pengubahan tingkah laku (*Behavior Modification*) yaitu pengelolaan kelas dapat didefinisikan dengan proses guna melaksanakan pengubahan tingkah laku peserta didik. Peran guru ialah melaksanakan pengembangan tingkah laku peserta didik yang baik dan juga berupaya melaksanakan pencegahan terhadap tingkah laku yang tidak baik. Dari kedua pendekatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran.

Aspek pengelolaan kelas yang kedua yaitu penerapan prosedur serta penerapan di dalam proses pembelajaran yang dilangsungkan dalam kelas. Menurut Muijs dan Reynolds (2008), yaitu Rules (aturan) merupakan suatu hal yang menjelaskan boleh dan tidak boleh murid lakukan, dan dinyatakan secara tertulis. Sedangkan LouAnne Johnson (2008), menambahkan bahwasanya aturan dan prosedur dalam pembelajaran didefinisikan dengan upaya yang tujuannya ialah menyediakan petunjuk pada siswa dengan jelas berkenaan dengan perilaku murid dan juga memberikan lebih banyak pilihan pada guru.

Upaya pertama yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yaitu pendekatan prosedur dan aturan. Prosedur dan aturan yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yakni dengan cara menyampaikan aturan tersebut secara tertulis. Prosedur dan aturan tersebut dilakukan secara terstruktur dan konsisten sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk mencapai perubahan. Realisasi aturan dan prosedur yang dilakukan yakni dengan menyediakan jadwal harian visual dalam bentuk tabel waktu. Selain menerapkan pendekatan prosedur dan aturan, sekolah tersebut juga menerapkan metode khusus seperti social story untuk menunjang kesuksesan pada proses pembelajaran.

Aspek pengelolaan kelas yang ketiga yaitu interaksi guru dengan siswa. Interaksi merupakan aspek penting karena terkait dengan pengaturan tingkah laku, dinamika kelompok, minat/perhatian, kedisiplinan, dan motivasi siswa dalam belajar. Interaksi sosial seringkali berdampak positif terhadap pengelolaan kelas. Hal ini merupakan hasil positif terbangunnya interaksi sosial antara siswa dengan guru. Interaksi guru dengan siswa terdiri dari beberapa aspek yang meliputi kemampuan berkomunikasi, menulis, mendengarkan, dan cara berperilaku yang benar bagi anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi suatu masalah.

Salah satu cara yang sudah diterapkan pada SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro berkaitan dengan interaksi guru dengan siswa dalam hal keterampilan berkomunikasi yakni penggunaan bahasa yang sederhana pada anak berkebutuhan khusus. Instruksi yang diberikan oleh guru disederhanakan dan penyampaian kalimat dilakukan secara jelas. Selain itu, guru juga telah menghindari penggunaan kalimat kompleks dan sulit dipahami oleh siswa berkebutuhan khusus, misalnya kalimat sarkasme, kiasan, serta kalimat ambigu dan

abstrak. Pilihan kata diberikan disesuaikan dengan kata yang lazim didengar peserta didik dan sesuai konteks. Serta guru memberikan siswa penawaran. Kemudian pada aspek keterampilan menulis guru menulis pesan/informasi dengan jelas dan dapat terbaca, guru menyiapkan media untuk menyampaikan pesan tertulis, guru memahami pesan tertulis yang disampaikan peserta didik. Pada aspek keterampilan mendengarkan guru menunggu respon siswa paling tidak 10 detik. Sedangkan berkaitan dengan aspek keterampilan non verbal guru menjalankan komunikasi serta ekspresi mata, guru mengimplementasikan sentuhan, guru menggunakan komunikasi diam, guru menggunakan komunikasi diam.

Pada aspek menghadapi perilaku bermasalah guru mengenal pemicu perilaku bermasalah, Guru menerapkan intervensi minor dengan pengalihan perhatian dan melatih kemampuan komunikasi pengganti, Guru menerapkan intervensi moderat dengan bersikap tenang dan mengajak peserta didik ke ruang lain, Guru melibatkan orang tua dan pihak lain dalam pencegahan dan penanganan perilaku bermasalah, serta Guru menghindarkan peserta didik dari bahaya.

Aspek pengelolaan kelas yang keempat yaitu Penerapan Kebijakan Penghargaan dan Hukuman. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Dalam mengelola kelas tidak jarang aturan dan prosedur yang sudah dibuat tidak dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik yang tidak jarang juga memunculkan perilaku bermasalah pada peserta didik. Mengatasi hal ini penerapan penghargaan dan hukuman dapat menjadi solusi yang efektif. Penerapan kebijakan penghargaan dan hukuman terkait dengan pengaturan tingkah laku, kedisiplinan, gairah belajar, dan dinamika kelompok. Pemberian penghargaan serta hukuman dalam penerapannya akan lebih baik apabila melibatkan peserta didik dalam pembuatan dan penerapannya.

Guru dapat membuat kontrak belajar dengan peserta didik, ataupun menggunakan papan penghargaan dan hukuman yang dapat diamati peserta didik setiap hari. Secara umum pemberian penghargaan dapat berupa pujian, maupun hadiah. Pujian dapat berupa verbal maupun non verbal. Sedangkan hadiah merupakan pemberian berupa benda yang dapat memotivasi peserta didik.

Hal-hal yang sering dilakukan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro dalam aspek penerapan kebijakan penghargaan yaitu guru menyediakan penghargaan yang ditunjukkan pada peserta didik tetapi tidak mudah dijangkau peserta didik, penghargaan dapat berupa makanan/minuman, kegiatan, sosial, atau token. Dalam hal penerapan kebijakan hukuman yang digunakan oleh SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yaitu Guru memberikan hukuman secara edukatif, dan guru memberikan

hukuman pada peserta didik hanya sebatas verbal (ucapan).

Pengaturan Kondisi Fisik Kelas

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas adalah terkait erat dengan segala benda mati yang ada lingkungan kelas. Adapun aspek pengaturan kondisi fisik kelas terbagi atas beberapa aspek yang meliputi keindahan, kenyamanan, sarana dan prasarana, aksesibilitas dan visibilitas. Carolyn & Edmund (2015), menyebutkan terdapat empat kunci bagi guru dalam melakukan pengaturan kelas secara efektif dan efisien. Pertama, berikan kebebasan mobilitas pada siswa; kedua, pastikan semua siswa masuk dalam pantauan guru; ketiga, berikan perlengkapan belajar yang mudah diakses siswa dan tetapkan instrumen belajar; keempat, kondisikan tampilan ruang kelas dan presentasi dapat dengan mudah dijangkau dan terlihat oleh siswa.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang pertama adalah sarana prasarana. Kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bojonegoro SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro menyediakan sarana serta prasarana pendidikan yang layak serta menjamin program pendidikan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam kedua sekolah pendidikan inklusif dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini tidak selaras dengan hasil temuan penelitian Keitaro (2017), bahwa beberapa sekolah inklusif di Jepang tidak memiliki jumlah ruang kelas yang cukup. Jumlah ruang kelas di sekolah kebutuhan khusus belum sejalan dengan meningkatnya jumlah siswa. Di beberapa sekolah, ruang kelas dibagi dengan partisi menjadi dua kompartemen, yang masing-masing memegang pelajaran yang terpisah. Dalam kasus lain, fasilitas non-kelas dikonversi ke ruang kelas sementara.

Situasi ini dianggap memburuk kualitas pengalaman siswa di sekolah kebutuhan khusus. Karena kurangnya infrastruktur dan fasilitas dalam bidang pendidikan khusus, pemerintah meminta masing-masing sekolah inklusif untuk membangun fasilitas yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memanfaatkan subsidi untuk membangun konstruksi bangunan tersebut, subsidi diberikan dari sepertiga sampai setengah dari biaya konstruksi. Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah menjadi salah satu penguat adanya kebijakan pendidikan inklusif di Jepang, sedangkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro masih belum ada dukungan penuh, termasuk anggaran khusus untuk pendidikan inklusif. Di Jepang pemerintah memanfaatkan dana subsidi yang mereka dapatkan diperhitungkan untuk alokasi insentif bagi staf onn pengajar yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus dan pemenuhan fasilitas pendidikan inklusif.

Sarana dan prasarana yang sudah ada di SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro yaitu ruang kelas yang sudah memadai berukuran sesuai dengan standart yang telah

ditentukan Dinas Pendidikan yaitu minimal berukuran $2m^2$ per peserta didik, kelas memiliki pintu dan pencahayaan memadai, Kelas memiliki kursi dan meja peserta didik yang memadai, kelas memiliki kursi dan meja guru yang memadai, kelas memiliki lemari penyimpanan, kelas memiliki papan panjang ukuran minimal 60cmx120 cm, kelas memiliki papan tulis dengan ukuran minimal 90 cm x 200 cm, kelas memiliki media pendidikan, kelas memiliki tempat sampah, kelas memiliki wastafel/tempat cuci tangan, kelas memiliki jam dinding, kelas memiliki soket listrik, kelas memiliki perlengkapan tulis untuk guru dan peserta didik, kelas memiliki jadwal harian visual, kelas memiliki wadah perlengkapan dan hasil kerja peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah diberi label yang sesuai, serta tersedia media untuk program pengembangan kekhususan.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang kedua adalah visibilitas. Menurut Karwati dan Priansa (2014), visibilitas atau keleluasaan pandang terkait dengan penempatan maupun penataan kelas sehingga tidak mengganggu pandangan peserta. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro menerapkan pengaturan kondisi fisik kelas dalam aspek visibilitas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: Guru menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di posisi yang mudah dijangkau, guru menata rapi dan menghindarkan bangku peserta didik berkebutuhan khusus dari distraksi, guru menggunakan gaya penataan kelas klaster.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan dalam segala aspek kehidupan. Adanya aksesibilitas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bagi individu dengan hambatan fisik agar dapat melakukan mobilitas tanpa hambatan. Aksesibilitas terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik merupakan kemudahan yang diberikan pada anak untuk dapat menjangkau lingkungannya dengan mudah. Contoh dari aksesibilitas fisik yaitu meliputi jalan, area, lahan, dan lingkungan tempat mobilitas anak. Sedangkan aksesibilitas non fisik merupakan akses yang diberikan berhubungan dengan sistem serta program yang tujuannya ialah memudahkan permasalahan dengan berbentuk sistem serta program tersebut.

Aksesibilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu masih sangat minim, karena bangunan masih naik turun berupa tanjakan dan tangga, belum ada toilet khusus untuk PDBK, lantai yang belum didesain untuk siswa tunanetra, di dalam ruang kelas yang masih belum aksesibilitas karena masih ada tangga untuk naik menuju papan tulis serta masih banyak selokan di depan ruang kelas yang belum didesain untuk keamanan PDBK. Selain itu SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu belum memiliki alat asesmen khusus yang tersedia seperti

audiometer asesmen untuk tunarungu dan snellen chart asesmen untuk tunanetra.

Hal ini bertolak belakang dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjelaskan bahwa setiap sekolah yang ramah anak juga harus memiliki aksesibilitas yang tepat. Adanya aksesibilitas sangat penting bagi anak dikarenakan untuk menunjang kemudahannya dalam beraktivitas di lingkungan sekolah. Aksesibilitas juga akan menunjang pemberian kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengakses lingkungan dengan aman, mandiri, dan mudah dalam setiap kegiatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kietaro (2017), menyatakan bahwa aksesibilitas bagi penyandang cacat di Jepang sangat diperhatikan oleh pemerintah, pengusaha, serta pelaku ekonomi. Diantara aksesibilitas yang difasilitasi yakni pada sekolah, universitas, mall, alat transportasi, toilet umum dan telepon umum. Berkaitan dengan perencanaan ukuran, standar, kualitas, dan desain aksesibilitas di Jepang sangat akses bagi para penyandang disabilitas semua usia. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat lebih inklusif dan sadar terhadap kesetaraan HAM.

Selama ini, kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas pada kota besar di Indonesia masih belum direalisasikan secara optimal dan hanya terbatas pada wacana. Berkaitan dengan hal tersebut, baik pemerintah maupun swasta harus pentingnya menyediakan sarana prasarana bagi para penyandang cacat fisik pada seluruh wilayah di Indonesia.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang keempat adalah fleksibilitas. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Fleksibilitas atau keluwesan adalah mencakup beberapa hal sebagai berikut : (1) Barang-barang di kelas mudah untuk ditata dan dipindahkan, (2) Penataan tempat duduk peserta didik juga mudah untuk diatur. SD Muhammadiyah

3 ICP dan SD Islam Terpadu menerapkan fleksibilitas dengan cara penataan kelas yang bertujuan memudahkan pengaturan untuk setting pembelajaran individual, kelompok dan memudahkan pengaturan peserta didik berkebutuhan khusus.

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang kelima adalah kenyamanan. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Kenyamanan meliputi: pencahayaan, penghawaan/suhu udara, akustik, serta kepadatan kelas. Pencahayaan dapat mempengaruhi keadaan fisik, psikologis, dan keindahan ruang. Pencahayaan haruslah tepat melalui mekanisme penggunaan jendela dan ventilasi. Pencahayaan kurang menyebabkan kelelahan mata dan sakit kepala. Sedangkan pencahayaan berlebihan juga akan mengganggu penglihatan.

SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu menerapkan pengaturan kondisi fisik kelas dalam aspek kenyamanan dengan indikator pencahayaan dengan cara peserta didik berkebutuhan khusus tidak ditempatkan di daerah paparan cahaya

berlebihan, Kelas tidak menggunakan lampu TL, Serta kelas mempergunakan tirai untuk pengaturan cahaya.

Penghawaan/Suhu Udara Suhu udara dapat mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Sirkulasi udara melalui jendela dan ventilasi penting untuk diatur dengan baik, sehingga peserta didik dapat berkonsentrasi dan terhindar dari ketidaknyamanan fisik. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada indikator penghawaan guru melakukan pengaturan suhu udara dengan baik.

Akustik adalah terkait dengan lingkungan belajar yang tenang. Ruang kelas yang bising menyebabkan peserta didik mudah lelah dan sulit untuk berkonsentrasi. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada indikator akustik Peserta didik berkebutuhan khusus diletakkan berjauhan dari sumber bunyi dan guru dapat mengendalikan keharmonisan kelas.

Kepadatan Kelas Kepadatan kelas berkaitan dengan jumlah peserta didik dalam kelas. Jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas dapat membuat kelas menjadi padat. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu pada indikator kepadatan menerapkan jumlah peserta didik tidak melebihi ukuran standar rumus hitung (luas total/jumlah peserta didik, tidak melebihi 2 m²).

Aspek pengaturan kondisi fisik kelas yang keenam adalah keindahan. Menurut Karwati dan Priansa (2014), Keindahan berkenaan dengan upaya yang dilakukan guru dalam menata kelas. Kelas yang ditata dengan menyenangkan serta indah ini memberi pengaruh positif terhadap tingkah laku serta sikap siswa. Peserta didik juga dapat belajar secara optimal dengan kondisi kelas yang indah. SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu menerapkan pengaturan kondisi fisik kelas pada aspek keindahan dengan melakukan Pengaturan kelas tidak menyebabkan timbulnya pemecahan perhatian atau distraksi serta Kelas tertata rapi dan tidak menimbulkan efek berlebihan.

4. KESIMPULAN

Aspek pengaturan peserta didik pada kedua sekolah sudah berjalan cukup baik. Dalam hal mengembangkan lingkungan yang memadai untuk pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata guru kelas masih belum sepenuhnya mengimplementasikan peraturan, prinsip serta prosedur pembelajaran pada kelas inklusi. Meski demikian, pada aspek interaksi sosial pada siswa berkebutuhan khusus sudah dirasa baik dengan berkomunikasi serta berinteraksi secara verbal maupun non verbal dengan siswa berkebutuhan khusus. Pada aspek penanganan masalah perilaku pada anak berkebutuhan khusus, sebagian besar guru belum menerapkan secara tepat terkait intervensi minor. Bentuk umpan balik yang diberikan yakni berupa pujian, motivasi, dan ucapan positif yang mendukung anak.

Secara umum kondisi fisik kelas di SD Muhammadiyah 3 ICP telah layak, walaupun sarana

serta prasarana ini dijumpai banyak permasalahan dalam upaya peningkatan, terutama media yang diperuntukkan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, ruang sumber yang belum tersedia dan ruang yang memiliki stimulus rendah dan tinggi yang belum ada. Adapun berkaitan dengan aspek keindahan, SD Muhammadiyah 3 ICP sudah cukup indah dan nyaman dalam dalam kepadatan, pencahayaan, akustik, dan penghawaan juga sudah cukup baik.

Faktor pendukung pengelolaan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kedua sekolah mencakup tiga aspek utama yaitu kondisi organisasional, lingkungan fisik, dan kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Ketiga aspek tersebut dapat berjalan baik secara sinergis dan beriringan.

Faktor penghambat pengelolaan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kedua sekolah SD Muhammadiyah 3 ICP dan SD Islam Terpadu Bojonegoro mencakup keterbatasan pengetahuan guru yang tidak berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa sehingga guru kelas dan GPK harus belajar kembali tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kurangnya media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, kurangnya keindahan ruang khusus, dan belum tepatnya prinsip penanganan perilaku, aturan, dan prosedur dalam pembelajaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akalin, S., & Sucuoglu, B. (2015). Effect of Classroom Management Intervention Based on Teacher Training and Performance Feedback on Outcomes of Teacher Student Dyads in Inclusive Classroom. *Journal of Educational Sciences: Theory & Practice*. 15(3). DOI: 10.12738/estp.2015.3.2543
- Anjarsari & Dyah, A. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi*. 1(2). DOI: 10.26740/inklusi.v1n2.p91-104
- Ashraf, A., Zhu, X., & Rauf, Q. (2010). Developing inclusive schools: The pivotal role of teaching assistants in promoting inclusion in special and mainstream schools in Northern Ireland. *International Conference on Education Technology Management*. Doi.org/10.1145/3300942.3300946
- Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Daryanto. (2013). *Inovasi Pembelajaran Efektif*. Bandung: Yrma Widya.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Depdiknas. (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/ Inklusi, Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009*. Jakarta.
- Depdiknas. (2006). *Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 2007*. Jakarta : Direktorat PSLB.
- Fitriani. (2016). *Model Pengelolaan Kelas Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang
- Gargiulo, Richard M. (2012). *Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality*. 4th Edition. USA: Sage Publication.
- Garnida, Dadang. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung : Refika Aditama.
- Glazzard, Jonathan. dkk. (2016). *Asih Asah Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar*. Terjemahan Ony Suryaman. Yogyakarta : PT Kansius.
- Hermanto. 2010. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah. *Jurnal Pendidikan Khusus*. 6(2). DOI: <https://doi.org/10.21831/jpk.v6i2.6737>
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media
- Isabella, P., Emosda., & Suratno. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi. *Jurnal Teknologi Pendidikan* 4(2), 45-49.
- Johnson, Louanne. (2008). *Pengajaran yang Kreatif dan Menarik: Cara Membangkitkan Minat Siswa melalui Pemikiran*. Terjemahan oleh Dani Dharyani. 2009. Jakarta: PT Indeks
- Karwati, Euis dan Priansa, Donni Juni. (2014). *Manajemen Kelas (Classroom Management)*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Mansor, et al. (2012). *Effective Classroom Management*. *International Education Studies Journal*. 5(5).
- Miles, Matthew B, A, et al. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Third Edition. United States of America : Sage Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muijs, Daniel dan David (2008). *Effective Teaching*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Nurfitriani, Rahmah. (2016). *Model Pengelolaan Kelas Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Tesis). Diunduh dari http://etheses.uinmalang.ac.id/11720/1/14760_017.pdf
- Peeters, Theo. (2009). *Panduan Autisme Terlengkap Hubungan Pengetahuan Teoritis Dan Intervensi Pendidikan Bagi Penyandang Autis*. Terjemahan Oscar H. Simbolon & Yayasan Suryakanti. Jakarta: Dian Rakyat.
- PKLK. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Rahardja, Djaja & Sujarwanto. (2010). Pengantar Pendidikan Luar Biasa (Orthopedagogik). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Santrock, John W. (2015). Psikologi Pendidikan. Edisi Kedua. Terjemahan Tri Wibowo BS. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sartica, Dwi & Ismanto, Bambang. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 3(1), 49-66.
- Somantri, S. (2007). Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Smith, J David. (2015). Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua. Terjemahan Enrica Denis. Bandung: Penerbit Nuansa
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji, (2014). Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 1-17.
- Suparno. (2001). Buku Pegangan Kuliah Pendidikan Anak Tunarungu (Pendekatan Orthodidaktik). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Winarsih, Murni. (2007). Intervensi Dini bagi Anak Tunarungu dalam Pemerolehan Bahasa. Jakarta: Depdiknas